



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 9 September 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 18 (delapan belas) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 9 (sembilan) fraksi B. a.n. Menteri Dalam Negeri, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan C. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI D. Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plt. a.n. Menteri Dalam Negeri, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan

Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, hari Senin, 9 September 2024, dibuka pukul 10.23 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plt. a.n. Menteri Dalam Negeri, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, yaitu:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI menyampaikan:
 - a. Pagu Anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar **Rp4.784.228.518.000,-** (*empat trilyun tujuh ratus delapan puluh empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah*), termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2025 sebesar **Rp89.271.812.000,-** (*delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*), dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.038.205.856.000,- (*dua trilyun tiga puluh delapan milyar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
 - Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp471.039.306.000,- (*empat ratus tujuh puluh satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah*).
 - Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp2.119.117.603.000,- (*dua trilyun seratus sembilan belas milyar seratus tujuh belas juta enam ratus tiga ribu rupiah*).
 - Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp155.865.753.000,- (*seratus lima puluh lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
 - b. Pagu Anggaran BNPP tahun 2025 sebesar **Rp267.135.531.000,-** (*dua ratus enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :

- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp233.632.179.000,- (*dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
 - Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp33.503.352.000,- (*tiga puluh tiga milyar lima ratus tiga juta ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
2. Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan:
- a. Pagu Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2025 sebesar **Rp505.534.826.000,-** (*lima ratus lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*), dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - Program Dukungan Manajemen sebesar Rp368.441.452.000,- (*tiga ratus enam puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
 - Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp137.093.374.000,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
 - b. Usulan tambahan anggaran tahun 2025 yang diajukan OIKN sebesar **Rp27.814.516.000.000,-** (*dua puluh tujuh trilyun delapan ratus empat belas milyar lima ratus enam belas juta rupiah*).

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plt. a.n. Menteri Dalam Negeri, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, yaitu:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025 sebesar **Rp4.784.228.518.000,-** (*empat trilyun tujuh ratus delapan puluh empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah*), termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2025 sebesar **Rp89.271.812.000,-** (*delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.038.205.856.000,- (*dua trilyun tiga puluh delapan milyar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
 - b. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp471.039.306.000,- (*empat ratus tujuh puluh satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah*).
 - c. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp2.119.117.603.000,- (*dua trilyun seratus sembilan belas milyar seratus tujuh belas juta enam ratus tiga ribu rupiah*).
 - d. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp155.865.753.000,- (*seratus lima puluh lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
2. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2025 sebesar **Rp267.135.531.000,-** (*dua ratus enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp233.632.179.000,- (*dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
 - b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp33.503.352.000,- (*tiga puluh tiga milyar lima ratus tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2025 sebesar **Rp505.534.826.000,-** (*lima ratus lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp368.441.452.000,- (*tiga ratus enam puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp137.093.374.000,- (*seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

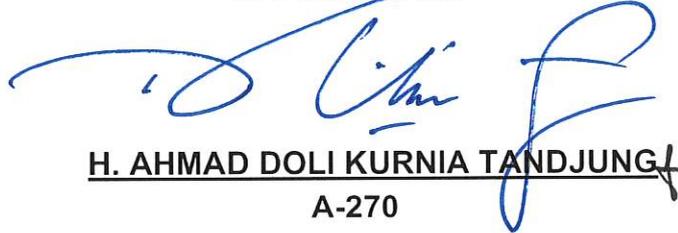
4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan OIKN sebesar **Rp27.814.516.000.000,-** (*dua puluh tujuh trilyun delapan ratus empat belas milyar lima ratus enam belas juta rupiah*), dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) OIKN tahun 2025 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB.

JAKARTA, 9 SEPTEMBER 2024

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270